

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSI SEKOLAH DASAR

Rika Widyawati
SDN Cukilan 01
Kabupaten Semarang-Jawa Tengah
rikawidyawati82@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the implementation of inclusive program in Public Elementary School 2 Klero (SD Negeri 2 Klero), Tenganan, Semarang. This study is an evaluation research with descriptive qualitative approach with CIPP model. The data source consisted of teachers, headmaster, and school committee. The data were collected through interview, observation and documentation. The results of this study: on Context evaluation showed that the school already has got the permission as well as the guidance in order to implement the inclusive program; on Input evaluation showed that the special infrastructures were inadequate, the curriculum had already been modified, special trainings had not been spread evenly, and there was no special assistant in school; on Process evaluation showed that the results of teachers' competency were acceptable in dealing with children with special needs, individual treatment, but BOS fund is the only financial support and there was no continual monitoring from government; and on Product evaluation the result showed that the academic and non academic achievements of children with special needs were average.

Keyword: Inclusive Education, Evaluation Program, CIPP Model

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas, 2003). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki kelainan dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan (Kemendikbud, 2012). Menurut Smart (2010), pendidikan inklusi adalah pendidikan pada sekolah umum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memerlukan pendidikan khusus pada sekolah umum dalam satu kesatuan yang sistemik. Sekolah inklusi menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Nashokha, tth.).

Sekolah pelaksana pendidikan inklusi dengan berbagai keragaman karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan maka sekolah perlu melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh,

agar anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hal yang tidak boleh dilupakan sebagai bagian dari upaya pembudayaan pendidikan inklusi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan inklusi dari waktu ke waktu (Kemendikbud, 2013).

Evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan dalam sebuah program. Sebuah kegiatan evaluasi akan diketahui bagaimana keberlangsungan program, kendala yang dihadapi dalam sebuah program, dan mendapatkan masukan bagi kelanjutan program tersebut. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan (Kustawan, 2012). Salah model evaluasi program yang tepat yaitu model CIPP. Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah system (Arikunto, 2010). Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan strategi untuk memperbaiki program kedepan sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan secara baik dari sebelumnya.

Di Kabupaten Semarang terdapat delapan SD yang ditunjuk sebagai SD inklusi. Salah satunya adalah SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tenganan. SD tersebut menjadi SD Inklusi mulai tahun 2010 dan merupakan satu-satunya SD inklusi di Kecamatan Tenganan. SD Negeri Klero 02 telah menerima peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus sejak tahun ajaran 2010/2011. SD Negeri Klero 02 telah menangani peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti kesulitan belajar, tuna netra dan tuna wicara. Dalam pelaksanaannya SD Negeri Klero 02 masih mengalami banyak hambatan sehingga dalam pembelajarannya kurang maksimal. Untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Klero 02, maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan program inklusi di sekolah tersebut.

Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental (Ilahi, 2013). Menurut Kustawan (2012; Kamalfuadi, 2011) pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah (Smith, 2006). Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Ilahi, 2013; Shabillah, 2015).

Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan pendidikan (Kemendikbud, 2012). Tujuan dari pendidikan inklusi adalah agar semua anak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan diskriminatif bagi semua anak (Kustawan, 2012). Sekolah yang ditunjuk mengadakan layanan pendidikan inklusi berhak melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian, baik dalam hal kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, sistem

pembelajaran serta sistem penilaiannya (Sulihandari, 2013).

Dari uraian diatas pendidikan inklusi merujuk pada suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak tanpa membedakan latar belakang anak karena keterbatasan fisik ataupun mental untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan pada umumnya. Jadi, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah umum agar dapat belajar bersama teman seusianya. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anak-anak yang mengalami kekurangan atau ketunaan dalam fisik ataupun mental pada kategori ringan, bukan anak yang berkebutuhan khusus yang cerdas istimewa.

Menurut Widoyoko (2014) evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang telah berlalu (Nuraeni, 2013). Selanjutnya Suharsimi Arikunto (2004) menambahkan evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijaksanaan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto, 2010). Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya.

Wirawan (2012) mengungkapkan evaluasi program adalah evaluasi dengan objeknya program pendidikan, yaitu aktivitas

yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi berbagai aspek pendidikan misalnya, kurikulum, proses dan metode pembelajaran mata pelajaran, layanan pendidikan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Tayibnapi (2008) menjelaskan suatu evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, informasi yang berguna untuk program yang dievaluasi. Informasi dari program yang ingin dievaluasi haruslah jelas dan berdasarkan kondisi nyata sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dari uraian diatas bahwa evaluasi program merujuk pada suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap jalannya suatu program guna mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Evaluasi program berguna untuk mengetahui tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya. Dari hasil evaluasi dapat sebagi bahan pertimbangan untuk menentukan alternatif kebijakan yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan.

Menurut Arikunto dan Cepi (2010) model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program maka harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan komponen-komponennya. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi (Anggun, 2013). Model CIPP yang dikenalkan oleh Stufflebeam ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), merupakan penggambaran dan spesifikasi

tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

b) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Informasi yang terkumpul selama tahap penilaian hendaknya digunakan untuk menentukan sumber dan strategi di dalam keterbatasan dan hambatan yang ada.

c) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

d) Evaluasi Produk/Hasil (*Product Evaluation*), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi proses diharapkan dapat membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi program, karena data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan (Widoyoko, 2011).

Arikunto (2008) menjelaskan secara rinci terkait evaluasi model CIPP, evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan

merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan. Evaluasi masukan (input), merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi proses menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, kapan kegiatan akan selesai dilaksanakan. Evaluasi product merupakan kumpulan deskripsi dan “judgement outcomes” dalam hubungannya dengan context, input, dan process, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan keber-hasilan program sekolah inklusi (Keyla, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program inklusi SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat menghasilkan informasi yang mendalam dan rinci tentang pelaksanaan program inklusi.

Lokasi pada penelitian ini yaitu di SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimana peneliti menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Untuk melengkapi hasil wawancara

tersebut dilakukan studi dokumentasi dan observasi.

Uji keabsahan yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mendukung hasil wawancara. Hasil wawancara guru dicocokkan (cross check) dengan hasil wawancara kepala sekolah, guru dan komite sekolah dengan instrumen pertanyaan yang sama. Triangulasi teknik digunakan untuk mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, selama penelitian dan sesudah penelitian. Analisis data selama dilapangan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh dan memperoleh hasil yang di inginkan. Aktivitas tersebut meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi yang kemudian akan di bawa untuk analisis setelah penelitian.

HASIL PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Hasil dari evaluasi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi di SD Negeri Klero 02. Hal tersebut sejalan dengan pengertian evaluasi (Widoyoko, 2014) yaitu penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Penelitian dimulai dari proses mengumpulkan data, menilai, dan menyimpulkannya. Berbagai latar belakang dan kemungkinan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan diketahui keberlangsungan pelaksanaan program inklusi SD Negeri Klero 02 Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

Konteks

Evaluasi konteks terhadap pelaksanaan program inklusi di SD Negeri Klero 02 meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang, tujuan pendidikan inklusi, kerjasama terhadap instansi lain, dan penerimaan peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri Klero 02 melaksanakan program inklusi karena adanya penunjukan dari dinas pendidikan kabupaten. Selain itu juga adanya anak-anak di sekitar sekolah yang masuk dalam kategori ABK namun orang tuanya belum mempunyai kesadaran menyekolahkan di SLB. SD Negeri Klero 02 ditunjuk dan dicanangkan sebagai sekolah pilot project pelaksana program pendidikan inklusi di Kecamatan Tenganan. Hasil temuan ini sudah sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 dimana “pemerintah kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik” dengan kebutuhan khusus.

Sekolah mendapat manfaat atas kepercayaan dan apresiasi dari masyarakat khususnya orang tua ABK. Tujuan dalam penyelenggaraan program inklusi di SD Negeri Klero 02 adalah pemerataan akses pendidikan yang ramah dan adil tanpa diskriminatif. ABK yang berada di lingkungan sekitar agar bisa bersekolah seperti anak-anak normal seusianya. Hal ini sesuai yang dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dimana peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Izin penyelenggaraan program inklusi di sekolah ini sudah ada karena sekolah ditunjuk dinas untuk menyelenggarakan

program inklusi. Namun sampai sekarang sekolah belum mendapatkan SK yang menerangkan sebagai sekolah penyelenggara program inklusi.

Sekolah dalam melaksanakan program inklusi berdasarkan pedoman yang diberikan dinas. Untuk menunjang berjalannya program tersebut sekolah melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Sekolah menjalin kerjasama dengan SLB Salatiga. Kerjasama dilakukan untuk memberikan bimbingan dalam pelayanan terhadap ABK. Temuan ini sudah sesuai dengan Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar Tahun 2012 dan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 11 ayat 1-5. Sejalan dengan penelitian Sunardi (2011) bahwa dalam hal manajemen institusi, mayoritas sekolah-sekolah ini telah mengembangkan rencana strategis (untuk program inklusif), secara sah mengangkat para koordinator, melibatkan beberapa kelompok terkait, dan menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi rutin.

Sasaran program inklusi di SD Negeri Klero 02 yaitu anak usia sekolah yang terdapat disekitar sekolah. Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah tidak melakukan proses seleksi. ABK yang diterima secara umum masih bisa mengikuti pelajaran atau arahan guru, mandiri, percaya diri, dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan anak normal. ABK yang dilayani ada 12 anak yang tersebar dari kelas I sampai kelas V. ABK yang ada terdiri dari 5 anak tuna Grahita, 3 anak autisme, 2 anak lamban belajar, 1 anak tuna laras, dan 1 anak tuna daksa.

Pada proses penerimaan peserta didik baru sekolah biasanya melakukan pengamatan ketika peserta didik mendaftar sekolah. Sekolah menerima ABK dengan menyesuaikan pada jenis kebutuhan atau kelainan yaitu kategori ringan, dan dimana ABK berdomisili dekat lingkungan sekolah. Hasil temuan ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 sekolah

menerima peserta didik dengan kelainan dan/atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atas pertimbangan terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut.

a. *Input*

Evaluasi input terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SD Negeri Klero 02 meliputi sarana prasarana, kurikulum, dan sumber daya manusia.

Sekolah menggunakan sarana prasarana yang sudah ada sebelumnya. Sarpras umumnya digunakan secara merata baik siswa reguler maupun ABK. Hal ini sesuai dengan Direktorat Pembinaan SLB (2007) dimana sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi cenderung sama dengan sekolah reguler pada umumnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih terbatas. Selama ini sekolah telah mendapatkan bantuan sarana berupa alat musik, alat memasak, drum band, alat menjahit, dan berbagai alat lainnya yang menunjang untuk mengembangkan keterampilan siswa. Bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah provinsi pada tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00. Selain itu, sekolah belum didukung dengan prasarana yang memadai seperti ruang atau kelas khusus guna melayani ABK. Sejalan dengan pendapat Mitiku et al. (2014) ada beberapa peluang yang mendukung pendidikan inklusif tidak dapat diambil sebagai jaminan karena kurangnya kesadaran, komitmen, dan kolaborasi serta ada tantangan nyata yang menghambat implementasi penuh dari pendidikan inklusi.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional dan dimodifikasi sesuai dengan ABK yang ada. Sekolah mengacu pada kurikulum SLB dengan melakukan penyesuaian di berbagai komponen sesuai

karakteristik peserta didik. Sekolah melakukan modifikasi mulai dari materi pembelajaran, media pembelajaran, penilaian, pelayanan tambahan jam belajar, remedial, atau pembimbingan khusus diluar jam sekolah. Hal ini diperkuat dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 7 bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan ABK sesuai bakat, minat dan potensinya. Sejalan dengan penelitian Mohammed (2014) yang menyatakan bahwa guru bersikap positif terhadap inklusi tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang praktek inklusi. Hal ini terbukti dalam penggunaan adaptasi pembelajaran yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan individu

Sebagian guru di sekolah belum pernah mendapatkan workshop, diklat, sosialisasi dan/atau pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 10 ayat 3, yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pokja Pendidikan Inklusif Kota Metro, 2015). Maka dari itu, pemerataan dalam keikutsertaan atau keterlibatan guru dalam workshop, diklat, sosialisasi/pelatihan khusus perlu ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kompetensi guru dalam menangani ABK.

Sementara dalam hal sumber daya manusia (SDM) yaitu guru pendamping khusus (GPK), SD Negeri Klero 02 belum memiliki GPK yang berlatar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Sekolah mengangkat guru umum untuk menjadi GPK. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 dimana “pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk

menyelenggarakan pendidikan inklusif". Penanganan ABK ditangani oleh guru kelas. Hasil temuan ini belum sesuai karena idealnya selain guru kelas dan guru mata pelajaran, sekolah harus memiliki guru pendidikan khusus yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Direktorat Pembinaan SLB 2007).

b. *Process*

Evaluasi Proses terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusif di SD Negeri Klero 02 meliputi pembelajaran, pelayanan ABK, pembiayaan, dan monitoring. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, menunjukkan bahwa guru telah memiliki kompetensi yang cukup memadai. Hal ini terbukti dari penyusunan RPP, pemberian materi dan bahan ajar kepada ABK dengan menggunakan kurikulum dan materi/bahan ajar yang sama atau reguler.

Guru tidak membedakan kurikulum dan materi/bahan ajar secara terstruktur. Guru menggunakan RPP reguler yang diberikan secara merata kepada semua siswa. Hasil temuan ini sesuai Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Akan tetapi karena ragam hambatan ABK sangat bervariasi, maka dalam implementasinya harus ada modifikasi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan ABK.

Hasil temuan menunjukkan sekolah melakukan penyesuaian (modifikasi) dengan meringankan materi, dan pemberian atau pelayanan tambahan terhadap ABK. Dalam penggunaan kurikulum dan pemberian soal latihan tetap sama tapi penyesuaian dilakukan secara individu dalam hal evaluasi dan pelayanan lainnya. Bagi ABK biasanya standar nilai dibedakan dan disesuaikan yaitu

diturunkan dari standar KKM siswa normal pada umumnya. Hasil temuan tidak sesuai dengan hasil penelitian Winda (2013) bahwa pelaksanaan inklusi tidak berjalan sebagai mana mestinya dalam mengidentifikasi, asesmen, RPP, PPI, tanggung jawab dan peranan guru.

ABK akan mendapatkan pelayanan lebih apabila dianggap perlu untuk remedi baik di saat jam istirahat maupun di luar jam sekolah. Hasil temuan ini sesuai menurut Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) tentang salah satu prinsip pembelajaran sekolah inklusif yaitu prinsip individual, dimana "guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai" (Ulfia Rahmi, 2011).

Pada pelaksanaan pembelajaran dikelas guru melakukan pengaturan tempat duduk. Biasanya anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan didepan. Hal itu dilakukan agar guru mudah memberikan perhatian pada anak ABK. Pendampingan pembelajaran dilakukan terhadap ABK pada saat pembelajaran berlangsung namun belum sepenuhnya karena keterbatasan kemampuan guru dan belum adanya guru pendamping khusus. Pendampingan pembelajaran dilakukan diluar pelajaran disaat jam tambahan.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah menjalani proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan oleh GPK terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. GPK melakukan modifikasi sistem evaluasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dengan bekerja sama dengan guru kelas.

Dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SD Negeri Klero 02, sumber dana khusus untuk melayani dan membantu ABK belum ada yang diterima dari pemerintah. Sekolah mengambil dan menggunakan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan program inklusi. Hal tersebut tidak sesuai PP nomor 48 Tahun 2008 Bab V pasal 51 ayat 2 menegaskan bahwa seharusnya pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pendidikan inklusi agar lebih efektif.

Dalam penyelenggaraan program inklusi di SD Negeri Klero 02 belum ada monitoring langsung dari dinas. Padahal dari pihak sekolah sangat membutuhkan adanya monitoring dan pendampingan terhadap penyelenggaraan program inklusi ini. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 12 dimana “pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya”. Sekolah SD Negeri Klero 02 sangat mendukung pelaksanaan program inklusi ini namun harus dibarengi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait.

c. *Product*

Evaluasi produk terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SD Negeri Klero 02 berupaya untuk melakukan penilaian terhadap dampak prestasi peserta didik dan hambatan penyelenggaraan program inklusi. Sehubungan dengan penerimaan ABK yang sudah berjalan cukup lama sejak 2010, maka dampak penerapan program tersebut dapat dilihat khususnya dari perkembangan maupun prestasi ABK. Sebagian besar ABK memiliki perkembangan akademik dibawah rerata atau standar. Dalam hal ini ABK belum mampu mencapai nilai standar sesuai KKMnya sehingga ada yang tidak naik kelas.

Sementara perkembangan non akademik ABK cukup baik atau rata-rata. Terdapat peserta didik ABK yang pandai dalam menggambar walaupun belum pernah menang dalam perlombaan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan atau prestasi ABK secara garis besar cukup baik dan rata-rata prestasi baik akademik maupun akademiknya cukup mengalami perkembangan. Hasil temuan ini sesuai dengan Mudjito (2012) yang menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 ranah pendidikan yang harus diberikan dalam proses belajar mengajar yang mencakup ranah kognitif (pembentukan kemampuan ilmu atau daya nalar), psikomotorik (pembentukan bakat keterampilan), soft skills (pembentukan intrapersonality, interpersonal, karakter pribadi untuk dirinya, sosial dan dengan sang Pencipta), dan karakter (pembentukan hard skills dan soft skills).

Pendukung program inklusi disekolah ini adalah adanya dukungan dari masyarakat. Dukungan itu berupa antusias masyarakat sekitar yang mempunyai ABK untuk menyekolahkan anaknya di SD Negeri Klero 02. Dengan adanya dukungam masyarakat tersebut diharapkan membantu penyelenggaraan program inklusi agar lebih baik.

Terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan program inklusi ini. Sekolah belum mempunyai guru pendamping khusus yang benar-benar ahli dalam menanggapi anak ABK. Sarana prasarana disekolah yang ada belum mampu melayani kebutuhan anak ABK. Pendanaan dalam pelaksanaan program inklusi hanya mengandalkan dari dana BOS saja. Keterbatasan guru dalam menangani anak ABK juga menambah deretan hambatan yang ada (bandingkan dengan Dwi Sartica dan Bambang Ismanto, 2016).

Terkait dengan hambatan yang dialami, sekolah telah melakukan beberapa usaha untuk menanggulangnya. Sekolah mengangkat

seorang guru umum untuk menjadi seorang guru GPK. Sekolah juga melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga untuk menangani ABK.

Dengan adanya program inklusi di SD Negeri Klero 02 berharap sekolah dapat ikut andil dalam menyukseskan wajib belajar 9 tahun untuk semua anak pada usia sekolah. Selain itu adanya perhatian pemerintah dan menindak lanjuti dengan memberikan tenaga GPK, dana, sarana dan prasarana yang memadai merupakan harapan terbesar yang dinanti oleh pihak sekolah.

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi pengembangan program yang ada di SD Negeri Klero 02 yang telah menyelenggarakan program selama 6 tahun. Sesuai dengan pendapat Arikunto (2010) bahwa kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini bagi guru dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka memecahkan masalah yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan program inklusi.

Manfaat bagi kepala sekolah dengan hasil penelitian ini diperoleh gambaran tentang penyelenggaraan program inklusi yang selama ini telah berjalan sehingga dapat mengambil keputusan untuk meningkatkan program pendidikan inklusi. Bagi dinas pendidikan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas program pendidikan inklusi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka disimpulkan bahwa: 1) Berdasarkan evaluasi terhadap komponen context, bahwa pelaksanaan program inklusi disekolah ini adanya penunjukan dari dinas. Sekolah sudah

mempunyai ijin dan pedoman dalam melaksanakan program inklusi. Sekolah telah bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait. Populasi yang dilayani sudah sesuai dengan Permendiknas No. 70/2009 pasal 3 ayat 1, dimana ABK yang dimaksud adalah anak dengan kebutuhan khusus dalam kategori ringan hingga sedang serta bisa ditangani oleh sekolah. 2) Berdasarkan evaluasi terhadap komponen input, menunjukkan ketersediaan sarpras secara umum sudah memenuhi kebutuhan semua siswa. Namun ketersediaan sarpras khusus bagi ABK belum memadai. Kurikulum sudah dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik. Pelatihan khusus bagi guru yang ada di sekolah belum merata. Sekolah juga belum memiliki GPK yang sesuai dengan kompetensinya. 3) Berdasarkan evaluasi terhadap komponen process, Kompetensi guru cukup memadai dalam menangani ABK, penanganan diberikan secara individual. Pembiayaan pelaksanaan program di sekolah masih diambil dari alokasi dana BOS. Selain itu belum ada monitoring lebih lanjut dari dinas terkait. 4) Berdasarkan evaluasi terhadap komponen product, dampak dari pelaksanaan program terletak pada perkembangan prestasi ABK. Perkembangan akademik dan non akademik ABK cukup baik. Sementara, jumlah ABK yang terlayani tergolong variatif dan semua ABK dilayani sekolah dengan menyesuaikan terhadap keadaan dan kemampuan sekolah. 5) Pendukung penyelenggaraan program inklusi yaitu antusias masyarakat sekitar yang mempunyai ABK menyekolahkan anaknya di SD Negeri Klero 02. Selain pendukung masih banyak faktor penghambat dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusi yaitu belum ada GPK yang sesuai dengan kompetensi, keterbatasan guru dalam menangani ABK, kesadaran orang tua mengenai program inklusi, sarpras yang kurang memadai bagi ABK, pendanaan, monitoring dan evaluasi dari dinas.

Saran

Beberapa temuan yang dapat direkomendasikan adalah: 1) Guru dan kepala sekolah perlu mengikuti kegiatan diklat dalam penanganan ABK, pelatihan khusus dan sejenisnya. Saling berbagi pengalaman dengan guru lain baik dalam perencanaan pembelajaran, penanganan ABK, dan evaluasi. 2) Sekolah perlu melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua ABK dalam hal penyampaian evaluasi, perkembangan atau pencapaian prestasi ABK baik di kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, orang tua bisa berkontribusi terhadap perkembangan ABK. Sekolah mengusulkan untuk memperoleh bantuan dana dan sarpras khusus bagi ABK. 3) Dinas perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara seksama dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan program inklusi. Program yang sudah direncanakan apakah sudah sesuai tujuan. Selanjutnya dinas pendidikan dapat membuat kebijakan perbaikan atau keputusan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun. 2013. *Evaluasi Peserta dan Instruktur Pelatihan*.
<https://goenable.wordpress.com/tag/evaluasi-peserta-dan-instruktur-pelatihan/>
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. 2012. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan SLB. 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas.
- Dwi Sartica dan Bambang Ismanto, 2016. Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangka Raya, *Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan*. Volume: 3, No. 1, 2016, halaman: 49-66
- Ilahi, Muhammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- KamalFuadi. 2011. *Pengertian Pendidikan Inklusif*.
<https://fuadinotkamal.wordpress.com/2011/04/12/pendidikan-inklusif/>
- Keyla F.W. 2011. *Ilmu Pengetahuan*.
http://ulankeyla.blogspot.co.id/2011_11_01_archive.html
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- Mitiku et all. 2014. Challenges and Opportunities to Implement Inclusive Education. *Asian Jurnal of Humanity, Art and Literature (AJHAL)*. Vol 1, no 2, 2014, hal 118-136. Ethiopia: Unersivity of Gondar.
- Mohammed, A. Alhassan. 2014. Implementation of Inclusive Education in Ghanaian Primary Schools: A Look at Teachers' Attitudes. *American Jurnal of Educational Research* 2014, vol 2 no 3, hal 142-148.
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Editor: Wardi. Jakarta: Baduose Media.
- Nashokha, Imam. Tth. *Pendidik Saatnya Menjadikan Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif Model Pendidikan untuk Semua*.
<https://www.academia.edu/5078049/>
- Nuraeni. 2013. *Permasalahan Program Evaluasi Pendidikan*.
<http://nuraeni68.blogspot.co.id/2013/03>

- /permasalahan-evaluasi-program-pendidikan.html
- Pokja Pendidikan Inklusif Kota Metro. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Metro*. Disdikbud Pemuda dan Olah Raga Kota Metro.
- Shabillah, D.A. 2015. *Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*. <http://indonesiana.tempo.co/read/40111/2015/04/22/Pendidikan-Inklusif-Bagi-Penyandang-Disabilitas>
- Sulihandari, Hartanti. 2013. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Inklusi Bagi Siswa Tunanetra Di SMA Negeri 1 sewon Bantul*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Sunardi, Mucawir Yusuf, Gunarhadi, Priyono, John L. Yeager. 2011. *The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia*. <https://ehe.pitt.edu/ojs/index.php/ehe/article/view/27>
- Smart, Aqila. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat (Metode Pembelajaran Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus)*. Jogjakarta: Kata Hati.
- Smith, J. David. 2006. *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Toyibnapi, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi. Untuk Program Pendidikan dan penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ulfia Rahmi. 2011. *Kegiatan Belajar Mengajar*. <https://tepenr06.wordpress.com/2011/11/04/kegiatan-belajar-mengajar/>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Windasari, Quinda. 2012. Pelaksanaan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus* (Online), Vol.1, No.1.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi dan profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.